

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Penelitian

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan.

Menurut Coombs (1970, hlm 40) menyatakan , “*the development of human resources through the educational system is an important pre-requisite for economic growth and a good invesment of scarce resources, provided the pattern and quality of educational output is geared to the economy’s manpower needs.*” Berdasarkan pernyataan tersebut, pendidikan merupakan investasi bagi sebuah negara. Pendidikan menyediakan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan persyaratan kualitas pendidikan harus mampu menghasilkan mutu yang berkualitas.

Menurut Sagala (2010, hlm 170), “mutu sekolah harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana.” Menurutnya, peningkatan mutu sekolah diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu sekolah yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu sekolah yang berorientasi pada keterampilan hidup.

Koswara dan Triatna (2010, hlm 275) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi *input, proses, output* maupun *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan

Ulpha Lisni Azhari, 2016

*Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu Sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu. *Proses* pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. *Output* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menjalankan program wajib belajar bagi setiap anggota masyarakatnya. Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu wujud program tersebut seperti yang disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang menyatakan bahwa penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP. SMP diharapkan mampu memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategik di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan *output* dan *outcome* sumber daya manusia yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Menurut Heyman dan Loxley (1989) dalam Suharsaputra (2013, hlm 232) menyatakan bahwa faktor guru, waktu belajar, manajemen sekolah, sarana fisik dan biaya pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. Dalam melaksanakan perencanaan strategik, terdapat beberapa faktor strategik yang perlu diperhatikan sebagai input yang dimiliki oleh sekolah, diantaranya manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pendidikan.

Terdapat 36 sekolah dalam satu sub-rayon yang terdiri dari empat kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Cipatat. Berdasarkan Tabel 1.1 digambarkan nilai akreditasi dari 36 sekolah pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Akreditasi Sekolah Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun 2014**

No	Tingkat Akreditasi	Persentase
1	A	33%
2	B	56%
3	C	11%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat*

Akreditasi di atas merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan mutu sekolah suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan tabel di atas, sekolah dengan nilai akreditasi A hanya di peroleh oleh 12 sekolah dengan persentase 33%. Pembiayaan dan fasilitas atau sarana prasarana merupakan beberapa kriteria standar yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga.

Biaya dan mutu sekolah mempunyai keterkaitan secara langsung. Menurut Morphet (1983, hlm 83), “biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.” Menurut Sagala (2010, hlm 171), “nilai ujian akhir sekolah bagi setiap peserta didik bukan satu-satunya indikator untuk menentukan kualitas sekolah.” Hal tersebut dimaksudkan bahwa masih terdapat faktor lain yang menentukan mutu sekolah. Disamping hasil UN, adanya anggapan masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan yang akan menentukan kualitas pendidikan. Permasalahan yang dialami oleh siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah bahwa menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2014, latar belakang pekerjaan orangtua siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat 38.70%

bekerja sebagai buruh tidak tetap, 24.87% sebagai pedagang, dan 21,11% sebagai karyawan swasta dengan tingkat penghasilan 82.70% kurang dari Rp 2.250.000. Kondisi tersebut mengakibatkan orang tua kurang mampu untuk menyediakan pembiayaan pendidikan dan mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari bantuan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar.” Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2014, dana yang digulirkan oleh pemerintah sejumlah Rp 37.136.779.406 untuk 132 sekolah yang diberikan bantuan tersebut.

Berdasarkan daftar penerima dana BOS di Kabupaten Bandung Barat, pada sub-rayon 1 terdapat 33 sekolah mendapatkan dana BOS sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sedangkan 3 sekolah lainnya merupakan sekolah swasta dengan sumber pembiayaan dari orang tua dan yayasan. Tabel Penggunaan Dana BOS SMP Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 pada Lampiran 2 menjelaskan penggunaan dana BOS pada 33 Sekolah Menengah Pertama di sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 13.086.434,047. Berdasarkan jumlah dana tersebut, pada masing-masing sekolah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan dana pendidikan tersebut berdasarkan pada petunjuk teknis untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Perincian rekap penggunaan dana BOS pada komponen alokasi penggunaan dana di 33 SMP di sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 dijelaskan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Rekap Penggunaan Dana SMP Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung**  
**Barat Tahun 2013-2015 (dalam Rupiah)**

No	Komponen	2013	2014	2014
1	Pengembangan Perpustakaan	283.698.570	293.969.797	299.890.760
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru	251.250.900	249.154.700	263.876.455
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	1.119.056.897	1.295.619.470	1.350.987.500
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian	1.458.890.999	1.581.030.441	1.659.124.435
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	1.864.915.188	1.936.991.481	2.136.790.821
6	Langganan daya dan jasa	558.997.270	578.690.217	588.980.684
7	Perawatan sekolah	892.409.950	842.349.009	925.499.100
8	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	3.760.995.250	4.548.091.525	5.558.219.622
9	Pengembangan profesi guru	790.083.350	805.393.850	895.295.930
10	Membantu siswa miskin	28.165.000	31.606.000	38.090.200
11	Pembiayaan pengelolaan BOS	279.214.700	327.521.686	327.521.687
12	Pembelian perangkat komputer	89.009.100	98.202.250	113.215.500
13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	458.980.800	497.813.621	500.088.250
	<b>Total</b>	<b>11.835.667.974</b>	<b>13.086.434.047</b>	<b>14.657.580.944</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat*

Berdasarkan data pada tabel di atas, setiap sekolah telah diberikan alokasi bagi setiap komponen. Setiap tahun rata-rata terjadi kenaikan pada setiap alokasi, hal tersebut menurut Dadang Rachmat, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, disebabkan oleh jumlah siswa yang diterima oleh sekolah pada setiap tahunnya. Dana tersebut memiliki aturan baku yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur alokasi dana. Hal tersebut memerlukan keterampilan pengelola pembiayaan pendidikan di

sekolah agar pembiayaan dari dana BOS tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien. Menurut Akdon, dkk (2015, hlm 61), “efisiensi biaya pendidikan hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor *input* pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa.” Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan, menurut Akdon, dkk (2015, hlm 61), dapat menggunakan metode keefektifan biaya yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan.

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dapat dijadikan strategi untuk melihat efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyasa (2012, hlm 85). “Beberapa kegiatan manajemen pembiayaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.” Manajemen pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan dari mulai merencanakan, melaksanakan, melaporkan, sampai dengan mengawasi dan mempertanggungjawabkan segala proses pembiayaan. Manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan sesuai, hal tersebut akan jelas berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah yang diharapkan.

Selain manajemen pembiayaan, pemanfaatan fasilitas menjadi salah satu penunjang peningkatan mutu sekolah. Fasilitas pembelajaran dalam dunia pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Arikunto dalam Wahyu Sri (2007, hlm 6), “sarana pendidikan yaitu semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.”

Diungkapkan oleh Lawanson dan Gede (2011, hlm 47), *“school facilities can be defined as those things that enable the teacher to do his/her work very well and helping the learners to learn effectively.”* Berdasarkan hal tersebut, fasilitas pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien. Selain itu, manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran juga menjadi pokok perhatian masyarakat. Asiabaka (2008, hlm 15) menyatakan, *“Planning, as in all management processes is the first logical step in facilities management. A second step is the development of broad educational goals and specific objectives.”* Dalam manajemen fasilitas, tahap perencanaan juga menjadi awal dalam proses manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Kemudian tahap pengembangan sebagai proses lanjutannya. Stoops dan Johnson (1967) dalam Bafadal (2004, hlm 27) mengungkapkan bahwa langkah manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan. Menurut Mulyasa (2004, hlm 50), *“Kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan serta penataan.”*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana bagi satuan pendidikan tingkat SMP sekurang-kurangnya memiliki prasaran sebagai berikut: 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) ruang laboratorium IPA; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat bermain/berolahraga.

Jika melihat pada kondisi di lapangan, pada beberapa SMP di sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat, mutu sekolah dapat digambarkan melalui hasil Ujian Nasional (UN). Realita di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang bermutu adalah sekolah-sekolah yang mempunyai dukungan finansial besar dari masyarakat. Akibatnya anak-anak dari kelompok masyarakat ekonomi lemah terpaksa harus merelakan dirinya mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah tersebut. Berdasarkan data rata-rata hasil UN di setiap sekolah tersebut, dapat dilihat bahwa hasil UN dari sekolah pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat memiliki selisih yang cukup jauh dari rata-rata nilai UN SMP Tahun 2014 pada 33 sekolah dengan pembiayaan BOS dan 3 sekolah dengan pembiayaan yang berasal dari orang tua dan yayasan, seperti yang dapat dijelaskan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Rata-rata UN SMP Sub-Rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat**

<b>Jumlah Sekolah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
33	26.55	25.91	27.89
3	31.78	32.71	35.82

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat*

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil UN dari 33 sekolah pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan dana BOS ini masih tergolong rendah ketika harus bersaing dengan lulusan dari sekolah lain yang tidak menggunakan dana BOS sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Dilihat dari kecenderungan tiga tahun terakhir, pada tahun 2014 justru mengalami kemunduran dengan dana BOS. Padahal jika di lihat kecenderungan total dana BOS yang diberikan pemerintah justru setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi

dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan.

Sementara itu, kelompok sekolah dengan pembiayaan yang bersumber dari dana bantuan pemerintah mengharuskan para pimpinan sekolah mengelola pembiayaan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kenyataannya, manajemen pembiayaan merupakan kesulitan bagi setiap kepala sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Kholik, Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Padalarang, “pembiayaan dari pemerintah terkadang terkendala dari segi pencairan dana yang tidak sesuai waktu. Selain itu, alokasi dana yang tidak sesuai kebutuhan terkadang menyulitkan sekolah dalam penggunaan, sehingga tidak sedikit sekolah yang tetap membutuhkan biaya dari sumbangan atau pembiayaan dari orang tua siswa.” Menurutnya, “pengawasan dari pemerintah masih kurang, hanya sebatas pengawasan terhadap pelaporan, sehingga tidak sedikit terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dari alokasi dana yang disediakan.”

Selain pembiayaan pendidikan, muncul animo lain yang menyebutkan bahwa sekolah bermutu ditunjukkan oleh fasilitas pembelajaran yang bermutu. Sementara, jika melihat bentuk alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Tidak jarang sekolah mengharapkan dana bantuan dalam bentuk hibah atau sumbangan dari masyarakat. Tidak jarang pula bahwa terkadang sekolah mencoba memungut kembali dana dari orang tua, guna memenuhi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, bagi beberapa sekolah dengan dana sumber dari BOS, fasilitas bukanlah hal yang mampu ditonjolkan. Sehingga tidak jarang, siswa dalam kegiatan pembelajarannya masih menggunakan fasilitas seadanya.

Jika memandang dari sisi manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran, beberapa kendala mengenai perencanaan fasilitas diantaranya adalah sulitnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik jika harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, banyaknya kebutuhan fasilitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan harus disertai dengan perincian biaya yang membengkak. Oleh karena itu, tidak jarang perencanaan fasilitas tersendat oleh kekurangan biaya. Dalam pengadaan fasilitas, hambatan yang terjadi tidak lain juga dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Selain itu juga pembiayaan menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengadaan fasilitas pembelajaran. Pengawasan fasilitas seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun pimpinan sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Pemerintah seharusnya mampu melengkapi fasilitas sesuai kebutuhan peserta didik di satuan lembaga tertentu. Bukan hanya memberikan kebijakan dan peraturan yang mengikat tentang sarana dan prasarana yang harus ada di sekolah. Namun terkadang, pengawasan yang diberikan sekolahpun hanya dilakukan saat akreditasi akan dilaksanakan atau pada saat terjadi kerusakan. Hal tersebut berkaitan dengan penyimpanan inventaris yang tidak terawat dan tidak terjaga. Oleh karenanya, penghapusan dan penataan fasilitas juga dilakukan seadanya oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut. Akibat dari kurangnya manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang dilakukan sekolah, peserta didik menjadi kurang merasakan manfaat dari fasilitas tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan dalam mutu sekolah.

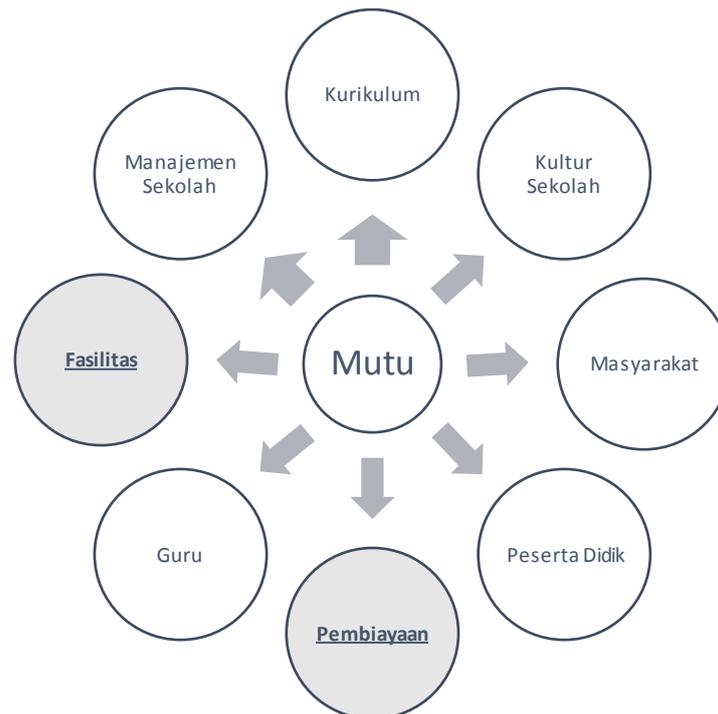
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Ratna Nurhayati (2008) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi perencanaan strategik terdapat hubungan yang signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah SMP di Kota Garut. Sejalan dengan hal tersebut. Deden Nugraha (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dalam pemanfaatan fasilitas pembelajaran kinerja mengajar guru terhadap mutu lulusan pada

SMP di Kota Bandung. Sedangkan Syamril (2011) menyatakan bahwa fasilitas dan pembiayaan memiliki pengaruh yang parsial terhadap mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. sedangkan kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu proses pembelajaran dan hasil belajar siswa madrasah ibtidaiyah di Kota Bandung.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan permasalahan dan kajian teori yang ada, maka penulis mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu Sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat.**”

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai kajian mutu sekolah. Khususnya pada faktor-faktor strategik yang berpengaruh pada mutu sekolah. Untuk mencapai mutu sekolah yang diharapkan tidak terlepas dari ketiga hal tersebut. Dalam penelitian ini, mutu yang diteliti meliputi mutu pada sisi *output*. Dimana mutu sekolah sebagai produk yang dihasilkan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk mencapai *output* pendidikan yang bermutu dibutuhkan *input* dan *proses*. *Output* dan *outcome* pendidikan yang bermutu akan dihasilkan dari *proses* yang bermutu. Di bawah ini adalah grafik identifikasi masalah yang telah dirangkum dari beberapa temuan pada latar belakang, diantaranya Ali (2007, hlm 361) menyatakan bahwa mutu sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor strategik seperti yang digambarkan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1: Faktor-faktor strategik yang mempengaruhi mutu sekolah (Ali. M, 2007. hlm 361)**

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas dua faktor strategik sebagai variabel yang dapat mempengaruhi mutu sekolah, yaitu manajemen pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Pemilihan dua faktor strategik tersebut didasarkan oleh fenomena dan permasalahan yang ditemukan penulis dari lapangan. Permasalahan yang ditemukan penulis adalah masih rendahnya mutu sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya manajemen pembiayaan pendidikan dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan

manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Fasilitas pembelajaran merupakan faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah. Dalam pencapaian mutu sekolah, fasilitas pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pemborosan dan tidak tepatnya pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai.

### **1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan besar, yaitu “Apakah pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah?” Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana gambaran manajemen pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana gambaran fasilitas pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana gambaran mutu sekolah siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat?
4. Seberapa besar terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah?
5. Seberapa besar terdapat pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah?

6. Seberapa besar terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah?

#### **1.4.Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor-faktor strategik tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan khusus penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Teridentifikasinya manajemen pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat.
2. Teridentifikasinya fasilitas pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat.
3. Teridentifikasinya mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat.
4. Teranalisisnya pengaruh pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat.
5. Teranalisisnya pengaruh fasilitas pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat.
6. Teranalisisnya pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.5.Manfaat Penelitian**

1. Dari aspek teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen perencanaan strategik pendidikan.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Dari aspek praktis
  - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan

dengan manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas. serta mutu sekolah.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam peningkatan mutu sekolah bagi sekolah menengah pertama.